



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Ratnadilla Ukkas^{1*}, Henny A Manafe², M. E. Perseveranda³

¹)Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: ratnadillaukkas29@gmail.com

²)Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: hennyunwira@gmail.com

³)Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: perseverandaerse@gmail.com

**Corresponding Author: Ratnadilla¹*

Abstract: Penelitian terdahulu maupun penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian maupun kajian pustaka suatu karya ilmiah baik mengkaji tentang pengaruh antar variabel maupun Faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini membahas perihal suatu kajian pustaka faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah, yakni memanfaatkan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, serta pengawasan keuangan daerah. Penulisan riset ini bermaksud untuk menentukan hipotesis yang berdampak pada masing-masing variabel supaya riset berikutnya bisa memanfaatkannya. Hasil yang didapat mempertegas bila: 1) Pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah; 2) Pengendalian internal akuntansi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah; 3) Pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu melaporkan keuangan pemerintah daerah; 4) Penggunaan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial secara simultan bagi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Pengawasan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menjadi hal yang kerap bersinggungan dengan masyarakat di seluruh negara. Masyarakat Indonesia selaku bagian dari masyarakat dunia mempunyai keharusan untuk terlibat aktif untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang

baik diperjelas sebagai pelaksanaan tata kelola manajemen pembangunan berprinsipkan demikrasi, menghindari dalam kesalahan dalam mengalokasikan dana, mencegah tindakan korupsi secara politik atau administratif, mendisiplinkan anggaran, dan menciptakan kerangka hukum politik untuk menumbuhkan kegiatan usaha (Mardiasmo, 2004:18).

Pemerintahan yang baik paling tidak memiliki tiga unsur, seperti keterbukaan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban. Keterbukaan berdasar pada kebebasan untuk mendapat informasi. Keterlibatan diperjelas sebagai partisipasi masyarakat untuk membuat keputusan secara langsung ataupun tidak langsung dari lembaga perwakilan yang mampu menyampaikan aspirasi. Lalu, pertanggungjawaban ialah tanggung jawab/akuntabilitas terhadap publik atas masing-masing kegiatan yang terlaksanakan (Mardiasmo, 2004: 18). Penerapan pemerintahan yang baik membutuhkan arketipe sebagai dasar bagi sistem lama yang cenderung sentralistis, yakni pemerintah pusat cukup kuat selama menetapkan kebijakannya. Arketipe baru itu mengarahkan sistem yang bisa meminimalkan kebergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, termasuk mendayagunakan daerah supaya bisa berdaya saing secara regional, nasional atau internasional.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu berkaitan dengan penerapan otonomi daerah membutuhkan pembaruan terkait tata kelola keuangan daerah maupun pembaruan keuangan negara. Ketentuan terkait tata kelola keuangan daerah, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemeirntah Pusat dan Daerah yang mengalami perbaikan menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Bahwa pelaporan keuangan sebagai unsur terpenting untuk menerapkan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan ke masyarakat. Keberadaan tuntutan yang kian membesar atas penyelenggaraan pertanggungjawaban publik memunculkan imbas bagi manajemen pemerintah dalam menginformasikan ke masyarakat, terkhusus mengenai informasi pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2004:159). Peran informasi pada laporan keuangan tidak bermanfaat bila dalam menyampaikan/menyajikan informasi keuangan tidak terpercaya. Kredibilitas laporan keuangan sebagai perwujudan dari tanggung jawab dalam mengelola keuangan publik dan berdasar pada PP No. 24 Tahun 2005, yaitu komponen nilai informasi mengenai penentuan keputusan bermacam pihak.

Mutu informasi selama membuat laporan keuangan kerap terpengaruh oleh mutu sumber daya manusia (SDM) yang bekerja secara maksimal terkait perancangan laporan keuangan. SDM bermutu dan mendapat dukungan dari penggunaan teknologi informasi secara tepat, maka bisa melancarkan tahap melaporkan keuangan daerah secara kredibel. Tidak hanya itu, pengendalian internal secara efektif maupun efisien pun dibutuhkan. Teknologi informasi pun berperan untuk menunjang komunikasi, terkhusus dalam menyampaikan informasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Seluruh kegiatan organisasi pemerintah hendak dilaksanakan secara menyeluruh dengan pengendalian berdasar ketentuan. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 perihal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian internal pemerintah perlu terlaksana di lingkungan pemerintah pusat/daerah supaya maksud dari organisasi bisa diperoleh.

Perihal lainnya yang berpotensi memengaruhi kredibilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah ialah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan ialah usaha terstruktur guna menentukan capaian kerja dan standar terkait perencanaan, guna menentukan sistem umpan balik informasi, perbandingan kinerja aktual dengan standar yang sudah direncanakan, penentuan apakah terdapat penyelewengan atautkah tidak, dan guna menentukan tindakan evaluasi demi memberi jaminan bila sumber daya organisasi sudah dimanfaatkan secara efektif. Teori keagenan turut memperjelas bila agen menyampaikan sikap oportunitasnya dan terkesan tidak suka dengan risiko. pertanggungjawaban yang pemerintah daerah perlihatkan selaku pihak eksekutif bukan sekadar menyajikan laporan keuangan secara lengkap, melainkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses bagi pengguna laporan

keuangan itu.

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam penulisan artikel ini guna menentukan hipotesis, seperti:

- 1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah pengendalian internal akuntansi memengaruhi positif maupun krusial bagi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif maupun krusial bagi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- 4) Apakah penggunaan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah?

KAJIAN PUSTAKA

Tepat Waktu dalam Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Standar akuntansi pemerintah (SAP) menuturkan bila laporan keuangan di sektor pemerintahan berperan untuk memfasilitasi informasi sesuai terkait kedudukan keuangan dan semua transaksi yang terlaksana oleh entitas laporan selama satu periode. Laporan keuangan berguna agar bisa menjalankan aktivitas pemerintah dan membantu dalam penentuan kepatuhan terhadap undang-undang. Maksud laporan keuangan pemerintah yang termuat pada standar akuntansi pemerintah memperjelas bila sepatutnya laporan keuangan menyampaikan informasi yang berguna terkait penilaian pertanggungjawaban dan menentukan keputusan di sektor perekonomian, politik, dan sosial. Sama seperti laporan keuangan pada perusahaan publik, laporan keuangan pemerintah pun perlu terpublikasikan secara tepat waktu. Pelaporan dianggap tepat waktu bila laporan itu tersampaikan maupun terpublikasikan ketika memberi peluang bagi penentu keputusan untuk merancang keputusan (Romney dan Steinbart, 2009: 28).

Menyelesaikan pengawasan LKPD tertunda sebagai dampak dari pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan LKPD ke BPK. Sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) pada 2011, sejumlah 158 LKPD (provinsi, kabupaten/kota) dengan pengawasan oleh BPK pada semester kedua. Tahun selanjutnya menurun menjadi 94 LKPD dan tahun 2013 berada di kisaran 108 LKPD dengan pengawasan yang terselesaikan pada semester kedua. Tahun 2014, BPK memeriksa 68 jumlah LKPD pada semester kedua. Di sektor pemerintah, tepat waktu selama melaporkan keuangan ditentukan pada UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 maupun UU No. 15 Tahun 2004. Tidak hanya undang-undang, tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah pun tertera pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Aturan ini mempertegas bila maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran selesai, kepala daerah berkewajiban melaporkan LKPD ke BPK untuk diperiksa, serta paling lambat dua bulan sesudah laporan itu diserahkan ke pemerintah daerah, BPK berkewajiban melaporkan hasil pengawasan terhadap LKPD itu ke DPRD. Dengan begitu, waktu maksimal guna menciptakan LKPD *audited* ialah lima bulan semenjak tahun anggaran selesai (Lase dan Sutaryo, 2014).

Informasi keuangan daerah diserahkan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri maksimal 31 Agustus tahun berjalan. Bila pemerintah daerah tanpa menginformasikan keuangan daerahnya, maka hendak mendapat peringatan tertulis dari menteri keuangan. Bila selama rentang waktu tiga puluh hari pascapenerbitan peringatan tertulis pemerintah daerah tidak menginformasikan keuangannya, menteri keuangan menentukan sanksi berupa menunda penyerahan dana perimbangan sesudah menjalin koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pemaparan ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005.

Tepat waktu dalam melaporkan keuangan merupakan periode pengumuman laporan

keuangan tahunan yang sudah teraudit ke masyarakat semenjak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) hingga tanggal menyerahkan ke Bapepam-LK (Rachmawati, 2008:5). Sesudah informasi yang sesuai disediakan secara cepat, maka bisa memaksimalkan kapasitas dalam memengaruhi keputusan, serta kekurangan dalam hal ketepatan waktu bisa berimbas pada pengurangan informasi dari kebermanfaatannya (Kieso *et.al*, 2011). Ada tiga ketentuan terkait keterlambatan dalam mencermati ketepatan waktu, (Dyer dan Mc Hugh, 1975) seperti: (1) *Preliminary lag*: jeda jumlah hari pelaporan keuangan hingga menerima laporan akhir pendahuluan oleh bursa; (2) *Auditor's report lag*: jeda jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan hingga tanggal pelaporan auditor yang mendapat tanda tangan; (3) *Total lag*: jeda jumlah hari antara pelaporan keuangan hingga tanggal menerima laporan yang terpublikasikan oleh bursa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₁)

Lestari dan Zulaikha (2007) menuturkan bila teknologi informasi yang berkembang seperti sekarang kerap mempermudah untuk siapa saja, termasuk di sektor aktivitas bisnis. Teknologi informasi menjadi unsur penting dari sistem informasi dan teknologi informasi yang mengarah ke penyampaian atau pengolahan informasi. Teknologi informasi sudah mengubah organisasi swasta atau organisasi publik. Atas dasar itulah, teknologi informasi sebagai sesuatu yang berperan vital sebagai penentu persaingan dan kapabilitas perusahaan dalam memaksimalkan capaian kerja bisnis untuk periode selanjutnya. Sumber daya teknologi kerap dipertimbangkan manajer dan konsultan untuk menetapkan kesuksesan perusahaan di periode berikutnya.

Handayani (2007) menuturkan bila informasi bermutu dibentuk melalui keberadaan sistem informasi yang terancang secara terstruktur. Keberadaan sistem informasi bermaksud guna mendukung kegiatan usaha di seluruh organisasi. pemanfaatan sistem informasi meliputi tingkat operasional dalam memaksimalkan mutu produk maupun produktivitas operasional. Dengan begitu, para pegawai perlu menerima dan memanfaatkan sistem informasi agar investasi besar dalam mengadakan sistem informasi disertai oleh produktivitas tinggi. Seseorang hendak mempergunakan sistem informasi bila ia menganggap bila sistem informasi itu bisa memberikan kebermanfaat baginya.

Teknologi informasi yang dimaksud ialah seluruh aspek terkait perubahan metode kerja yang awalnya terlaksana secara konvensional mengarah ke sistem komputerisasi. Teknologi informasi seperti komputer, perangkat lunak, terminal data, jaringan, dan beberapa macam lain terkait teknologi informasi. Teknologi informasi bukan sekadar teknologi komputer yang bertugas memproses maupun menyimpan informasi, tetapi berperan guna menyebarkan informasi. Komputer merupakan perangkat untuk menggandakan kompetensi manusia, serta mampu mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan (Wilkinson *et. al.*, 2000).

Tata kelola teknologi informasi tidak sekadar melakukan pengelolaan perangkat keras maupun perangkat lunak, tetapi perlu mengatur surat elektronik, pesan suara, sistem grupware yang memberi peluang bagi karyawan maupun pihak lainnya. Tata kelola informasi pun mempertegas bila pengelolaan jaringan pemasok dan pelanggan dalam jaringan internet atau jaringan dari internet (Indriasari dan Ertambang, 2007). Hussein *et. Al.*, (2005) mempertegas bila mengembangkan *e-government* sebagai tahap perubahan dari konvensional ke elektronik sehingga memerlukan usaha terstruktur terkait subjek, objek maupun metode mengenai tahap perubahan itu. Tahap perubahan ini beracuan ke tiga aspek, yakni undang-undang terkait teknologi informasi maupun komunikasi, situasi sekarang ini maupun dampak lingkungan terhadap tuntutan pelayanan publik, dan perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi.

Wilkinson *et. al.*, (2000) menambahkan bila aspek yang cukup vital dari seluruh transformasi kerja dari konvensional ke komputerisasi ialah meningkatkan:

- 1) Memproses transaksi maupun data lain secara efektif-efisien.
- 2) Ketepatan pada hitungan dan perbandingan.
- 3) Biaya dalam memproses dari setiap transaksi lebih murah.
- 4) Mempersiapkan laporan dan keluaran lain sesuai dengan jadwal.
- 5) Lokasi untuk menyimpan data lebih sederhana dengan kemudahan akses lebih tinggi saat diperlukan.
- 6) Alternatif masukan data dan ketersediaan keluaran lebih bervariasi.
- 7) Produktivitas cenderung tinggi pada pegawai dan manajer yang memanfaatkan komputer secara efektif terkait penentuan keputusan dan pertanggungjawaban tugas.

Pengendalian Internal Akuntansi (X₂)

Pengendalian internal sesuai pemaparan Tuanakotta (2014:352), yaitu tahapan, kebijakan, dan tata cara atas rancangan manajemen agar bisa memperjelas laporan keuangan yang kredibel, serta membuat laporan keuangan berdasar pada kerangka akuntansi. Pengendalian internal ini mengulas segala sesuatu, seperti tingkah laku tata kelola dalam mengendalikan, kemampuan utama, menilai risiko, akuntansi, sistem keuangan lain, serta aktivitas pengendalian tradisional. Pengendalian internal bermaksud guna melaporkan keuangan agar terbebas dari kesalahan dalam menyajikan isi akibat tindakan curang atau kesalahan.

Pengendalian internal (Supriyono, 2016:147) pada 1949, pembentukan komite oleh American Institute of Accountants (AIA) memperjelas bila pengendalian internal ialah perencanaan organisasi dan semua prosedur maupun ukuran yang direncanakan, yang bermanfaat untuk bisnis tertentu dalam memberi perlindungan bagi kekayaannya, pemeriksaan ketepatan dan kredibilitas data akuntansi, memperkenalkan efisiensi aktivitas bisnis, serta mengarahkan kepatuhan terhadap kebijakan manajerial. Pengertian itu mempertegas bila sistem pengendalian internal mencakup lebih luas dibanding peranan departemen akuntansi maupun keuangan. Sistem pengendalian internal pun meliputi konsepsi terkait kegiatan di sektor lainnya, seperti kajian ruang dan waktu yang sifatnya teknis, serta pemanfaatan pengendalian kualitas dengan pengawasan sebagai peran produksi.

Pada 1958, Institut Akuntan Publik Amerika (AICPA) sesuai penuturan Supriyono (2016:148), mempertegas pengertian maupun cakupan pengendalian internal, seperti:

- 1) Pengendalian akuntansi meliputi perencanaan organisasi, seluruh tata cara, terkhusus terkait upaya mengamankan aktiva dan kredibilitas catatan keuangan.
- 2) Pengendalian administratif meliputi perencanaan organisasi, seluruh tata cara, terkhusus terkait efisiensi operasional maupun ketaatan terhadap kebijakan manajerial, serta kerap terkait catatan keuangan.

International Federation of Accountants (IFAC) melalui Supriyono (2016:149), mempertegas bila sistem pengendalian internal merupakan perencanaan organisasi dan seluruh sistem yang terstruktur, termasuk terkait finansial maupun sistem lain, yang terancang guna mempermudah dalam mendapat tujuan manajemen, selagi sistem itu praktis, mudah digunakan, dan efisien dalam menjalankan bisnis, termasuk ketaatan kepada kewenangan manajemen, mengamankan aktiva, mencegah maupun mendeteksi tindakan penyelewengan, kredibilitas atau kelengkapan dari persiapan ketepatan waktu informasi keuangan.

COSO (2013:3) dalam Supriyono (2016:156) mempertegas bila pengendalian internal sebagai tahapan yang terpengaruh oleh dewan direksi, manajemen maupun anggota lainnya di suatu unsur, yang terencana guna memberi rasa yakin secara layak terkait upaya memperoleh tujuan mengenai operasional, laporan maupun ketaatan. COSO menambahkan bila pengendalian internal merupakan bentuk dari operasional organisasi dan sebagai unsur yang menyatu dengan aktivitas manajemen dasar. Kesuksesan suatu pengendalian internal

beracuan ke kemampuan maupun hambatan selama melaksanakannya yang berkaitan dengan bermacam batasan. Konsepsi pengendalian internal, seperti:

- 1) Pengendalian internal tidak berperan menjadi tujuan, tetapi tahap untuk memperoleh tujuan dan sebagai serangkaian tindakan yang terkait satu sama lain, bukan sekadar unsur penambah dari infrastruktur suatu unsur.
- 2) Pengendalian internal terlaksana oleh orang, serta tidak sekadar memuat kebijakan saja, melainkan dilaksanakan oleh seluruh entitas di suatu organisasi.
- 3) Pengendalian internal bisa memberi rasa yakin secara layak, bukan rasa yakin mutlak terhadap manajemen dan dewan komisaris.
- 4) Pengendalian internal bermaksud guna mencapai tujuan yang terkait satu sama lain, terutama dengan laporan keuangan, kepatuhan maupun efektivitas operasional.

Pengawasan Keuangan Daerah (X₃)

Haryani (2011) memaparkan bila pengawasan sebagai serangkaian aktivitas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi terkait penyelenggaraan kebijakan publik. Pengawasan terlaksana guna memberi jaminan bila seluruh kebijakan program maupun aktivitas terlaksana berdasar pada peraturan. Effendi (2003) menuturkan jika pengawasan merupakan bermacam tindakan atau kegiatan dalam memberi jaminan supaya penyelenggaraan suatu kegiatan sesuai rencana dan berdasar pada tujuan utama, serta terselenggara secara maksimal.

Adisasmita (2011) menambahkan jika pengawasan, yaitu tahap memantau kinerja, tindakan untuk memperbaiki ketika kinerja tidak sesuai rencana. Dengan begitu, pengawasan bermaksud guna:

- 1) Memberi jaminan bila pekerjaan sesuai perencanaan/peraturan
- 2) Mengantisipasi kesalahan.
- 3) Perbaikan secara mudah dan cepat.
- 4) Menerapkan tata tertib.
- 5) Perbaikan terhadap kesalahan secara layak dan meyakinkan.
- 6) Mengidentifikasi maupun menjabarkan kinerja secara optimal.
- 7) Perbaikan mutu tata kelola secara menyeluruh.

Halim (2002) memaparkan bila pengawasan keuangan daerah sebagai upaya dalam memberi jaminan supaya tata kelola keuangan terlaksana berdasar pada peraturan dan tujuan. Kuswandi (2016) menambahkan bila pengawasan keuangan daerah, yaitu bermaksud guna mengawasi segala pengeluaran daerah sudah sesuai dengan rencana awal, penerimaan daerah itu pun bisa diserahkan ke kas daerah sesuai jadwal yang ditentukan, dan supaya jumlah yang sudah ditentukan bisa terwujud sebagai bentuk penutupan atas pengeluaran daerah.

Pada PP Nomor 58 Tahun 2005, tata kelola keuangan daerah ialah seluruh aktivitas, seperti merencanakan, melaksanakan, mengatur, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. DPRD menjalankan tugas untuk mengawasi keuangan daerah yang terfokus ke pengawasan penyelenggaraan anggaran belanja daerah sesuai penjelasan di UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 Ayat 1C, memperjelas bila DPRD bertugas dan berkewenangan mengawasi penyelenggaraan peraturan daerah maupun aturan lain, peraturan kepala daerah, APBD, serta kebijakan menjalankan program pembangunan daerah maupun kerja sama internasional di daerah.

Coryanata (2007) memaparkan bila pengawasan atas pelaksanaan dewan berwujud pengawasan langsung maupun tidak langsung dan preventif maupun represif. Pengawasan langsung terlaksana secara personal dengan melakukan pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan ke tempat kerja, serta meminta langsung dari pelaksana dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung terlaksana dengan mengkaji laporan yang didapat dari pelaksana. Kemudian, pengawasan preventif terlaksana dengan preaudit, yakni sebelum memulai pekerjaan. Pengawasan represif terlaksana dengan postaudit dengan memeriksa ke tempat kerja.

Sari (2010) menuturkan bila supaya peran pengawasan bisa terlaksana secara cepat dan mudah, maka memerlukan perancangan proses yang terstruktur, secara bertahap pengawasan tertuang ke bentuk rencana kerja dan diikuti oleh penentuan jadwal maupun partisipasi dari pihak dalam atau luar. Sederhananya, pengawasan anggaran sebagai tahap mengawasi relevansi anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	SP Sari, B Witono (2014)	Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah, Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	SDM, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial bagi kredibilitas dan tepat waktu dalam melaporkan keuangan daerah.
2	F Ariesta (2013)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Informasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mutu SDM, penggunaan teknologi informasi maupun pengendalian informasi berdampak positif dan krusial bagi laporan keuangan pemerintah daerah
3	A Niahayah, R Trisnawati (2015)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel SDM, penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	MA Anshori (2018)	Pengaruh Pengawasan keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel pengawasan keuangan daerah, SDM, dan penggunaan teknologi informasi berdampak positif dan krusial bagi ketepatan dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.
5	A Rachmawati, YT Cahyono (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Ketersediaan SDM, penggunaan teknologi informasi, komitmen organisasi maupun pengendalian internal akuntansi berdampak positif dan krusial bagi kredibilitas dan ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah..
6	A Noviani, D Hendrasyah (2020)	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem pengendalian internal dan informasi tata kelola keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan waktu melaporkan keuangan
7	KP Astrawan, MA Wahyuni (2016)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas SDM, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Sistem informasi akuntansi, kapasitas SDM, pengendalian internal maupun pengawasan keuangan pemerintah daerah berdampak positif dan krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.
8	T Vidyasari (2012)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penggunaan teknologi informasi maupun pengendalian internal berdampak positif dan krusial bagi kredibilitas dan ketepatan waktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.
9	A Roshanti, SE Edy Sujana (2014)	Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan system Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	Kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi nilai informasi pelaporan keuangan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pemerintah Daerah	pemerintah daerah
10	D Firmasnyah, TH Dewi (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, terhadap Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapaatan Dan asset Kabupaten Bener Meriah.	Sistem pengendalian internal berdampak positif dan krusial bagi tepat waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah di Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah.
11	A Trisaputra (2013)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .	Penggunaan teknologi informasi maupun pengawasan keuangan daerah berdampak positif dan krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah
12	BDA Ersianti, INNA Putra (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Secara parsial variabel pengendalian internal berdampak krusial bagi ketepatan waktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Prosedur menuliskan artikel ini ialah menggunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain. Pada kajian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melangsungkan kajian kualitatif, yakni kajian itu sifatnya eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi Memengaruhi Ketepatanwaktu Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah

Terkait sistem informasi akuntansi, komputer berpotensi besar memaksimalkan kemampuan sistem. Saat komputer dan elemen pendukung berkaitan dengan teknologi informasi disatukan ke sistem akuntansi, maka tidak bisa menambahkan maupun mengurangi kegiatan umum. Sistem informasi akuntansi sejauh ini akan bertugas sebagai pengumpul, pemroses, dan penyimpan data. Sistem tetap memuat pengendalian terhadap ketepatan atau kesesuaian data. Sistem pun bakal menciptakan laporan maupun informasi lain.

Namun, pengomputerisasian sistem informasi akuntansi kerap memicu perubahan terhadap karakteristik kegiatan. Data bisa saja terkumpul dengan alat khusus. Catatan akuntansi mempergunakan beberapa kertas. Mayoritas bila tidak secara keseluruhan, prosedur dalam memproses terlaksana secara otomatis. Hasil yang didapat terlihat rapi, dengan beragam bentuk, serta bisa mendistribusikan ke banyak pihak. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, paling tidak aparat pemerintah akan bekerja secara mudah dan cepat. Partisipasi teknologi informasi selama menyusun laporan keuangan daerah setidaknya bisa mengantisipasi kekeliruan dan memaksimalkan mutu laporan keuangan (Indriasari dan Ertambang, 2007).

Jurnali dan Supomo (2002) menuturkan jika pemanfaatan komputer bisa bermanfaat besar untuk perusahaan, terkhusus mengenai kecepatan maupun kemudahan. Perubahan metode kerja dari konvensional ke sistem komputerisasi setidaknya memberi harapan bila pekerjaan mampu terlaksana secara cepat dan tepat, maka kinerja organisasi secara menyeluruh bakal mengalami peningkatan.

Lestari dan Zulaikha (2007) mempertegas bila teknologi informasi bisa menjadi sistematis dalam berkoordinasi lintas unit dan memengaruhi proses di organisasi. Melalui pemanfaatan teknologi, paling tidak koordinasi antarunit di organisasi bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Dewi dan Gudono (2007) turut menyampaikan pendapat bila pemanfaatan teknologi informasi pada akuntansi bisa memaksimalkan capaian kerja akuntan selama penyusunan laporan keuangan, maka bisa merancang laporan dengan menghemat waktu dan hasil yang didapat pun lebih akurat.

Penggunaan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatan dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. Sama seperti hasil riset A Trisaputra (2013) dan FL Sembiring yang menyebut bila penggunaan teknologi informasi berdampak secara signifikan bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian Intern Akuntansi Memengaruhi Ketepatanwaktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suharli (2006:174) memaparkan bila pengendalian internal merupakan semua sistem dan tata cara atas penetapan manajemen sebagai upaya melindungi kekayaan perusahaan dari kesalahan/lalai, tindakan curang maupun kejahatan. Memisahkan kewenangan dan tugas maupun arus, formal maupun metode pendokumentasian formulir sebagai kekuatan utama sistem pengendalian internal. Hery (2014:127) memaparkan soal pengendalian internal sebagai kebijakan dan tata cara dalam menjaga aktiva perusahaan dari bermacam tindakan penyelewengan, memberi kepastian bila informasi akuntansi benar-benar tepat, serta memberi jaminan bila seluruh hukum atau perundang-undangan dan kebijakan manajemen sudah dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Pengendalian internal pun terlaksana guna mengawasi aktivitas ataupun keuangan perusahaan sudah terlaksana berdasar apda ketentuan atau kebijakan yang sudah direncanakan manajemen.

Sistem pengendalian internal meliputi kewenangan dan tata cara yang dirancang agar bisa meyakinkan manajemen bila perusahaan telah memperoleh target dan tujuan. Kebijakan maupun tata cara ini kerap dikenal sebagai pengendalian, selanjutnya secara kolektif merancang pengendalian internal tersebut. Arens (2014: 340), manajemen mempunyai tiga tujuan terkait perancangan sistem pengendalian secara efektif, yakni:

- 1) Kredibilitas laporan keuangan. Manajemen mempertanggungjawabkan diri untuk menyiapkan laporan untuk pemodal, kreditur maupun pengguna lain. Pengendalian internal bermaksud untuk mempermudah dalam melaporkan keuangan, tepatnya sebagai pelengkap atas pertanggungjawaban dalam melaporkan keuangan tersebut.
- 2) Kemudahan dan kecepatan operasional . Pengendalian yang perusahaan lakukan bermaksud untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya secara cepat dan tepat agar mampu mengoptimalkan tujuan perusahaan. Pengendalian ini bermaksud agar bisa memperoleh informasi keuangan maupun nonkeuangan terkait operasional perusahaan untuk menentukan keputusan.
- 3) Patuh terhadap hukum. Akuntansi pun tidak berkaitan tidak langsung, misal perlindungan hukum maupun hak sipil, sedangkan aspek lain pun berkaitan dengan akuntansi, misal peraturan pajak maupun provisi legal antikecurangan.

Pengendalian intern akuntansi berdampak positif maupun krusial bagi ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah dikaji beberapa pihak, seperti SP Sari, B Witono (2014) yang memperlihatkan bila pengendalian internal akuntansi memengaruhi bermakna bagi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. Kajian milik I Sukri (2017) mengemukakan bila pengendalian internal akuntansi secara simultan memengaruhi signifikan bagi ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan keuangan Daerah Berdampak pada Ketepatanwaktu dalam Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah

Halim dan Kusufi (2012) menyampaikan gagasan soal sistem pengukuran sektor publik sebagai sistem dengan maksud memberi bantuan bagi manajer dalam penilaian perolehan strategi dengan indikator kinerja keuangan maupun nonkeuangan. Pengukuran kinerja sektor publik sejauh ini sudah mengalami perkembangan pesat semenjak diperkenalkan pada medio 1940-an di Amerika Serikat. Perkembangan itu tersebar ke semua negara melalui program organisasi internasional, misal PBB, IMF maupun World Bank (Bawono, 2015)

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, kebutuhan pengukuran maupun informasi kinerja meningkat. Hanya saja, kemampuan suatu lembaga yang tergolong rendah dan tingkat korupsi yang tinggi memicu peningkatan kebutuhan itu tidak disertai oleh ketersediaan informasi kinerja yang menghadirkan kebutuhan yang tidak memuaskan (Mimba, et al, 2007).

Di Indonesia, berkembangnya pengukuran kinerja dirintis sejak memberlakukan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 terkait LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Melalui perkembangan yang terjadi, menghadirkan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Berkembangnya pengukuran ini memberi kesempatan bagi daerah guna memperlihatkan sebagai daerah terbaik di Indonesia (Bawono, 2015).

Fontanelle dan Rossieta (2014), sesuai kajian Lin (2010), menyebut kinerja pemerintah daerah berhubungan positif dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. Kian baik opini kinerja, maka kian besar peluang daerah itu mempunyai pertanggungjawaban laporan keuangan. Pengawasan keuangan daerah positif maupun krusial bagi ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah atau sesuai dengan kajian milik MA Anshori (2018), dan KP Astrawan, MA Wahyuni (2016).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Intern maupun Pengawasan Keuangan Daerah Berdampak pada Ketepatanwaktu dalam Melaporkan Keuangan Pemerintah Daerah

Jurnali dan Supomo (2002) mempertegas bila dalam memanfaatkan teknologi bakal memengaruhi perilaku terkait pemakaian teknologi untuk menuntaskan suatu pekerjaan. Komputer merupakan elemen dari teknologi informasi yang mengubah organisasi selama melaksanakan kegiatannya. Pemanfaatan komputer bermanfaat signifikan terhadap perusahaan, terkhusus mengenai kemudahan, kecepatan, dan ketepatan. Perubahan prosedur kerja dari manual ke sistem komputerisasi paling tidak mampu memicu pekerjaan bisa terlaksana secara tepat dan cepat, maka kinerja organisasi pun mengalami peningkatan secara menyeluruh.

Teknologi informasi yang berkembang bukan sekadar dipergunakan ke organisasi yang berkecimpung di sektor bisnis, melainkan ke organisasi sektor publik. Sesuai uraian PP Nomor 56 Tahun 2005, menyebut bila guna merespons penyelenggaraan pembangunan sesuai prinsip pengelolaan pemerintah yang baik, pemerintah pusat/daerah memiliki kewajiban meningkatkan maupun mempergunakan teknologi informasi demi mengoptimalkan tata kelola keuangan, serta penyaluran informasi keuangan daerah ke layanan publik. Pemerintah harus mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dalam pembangunan jaringan sistem informasi manajemen maupun prosedur kerja yang memberi peluang agar pemerintah bekerja secara terintegrasi dan mempermudah akses antarunit.

Hussein *et. al.*, (2005) menguraikan bila pemanfaatan teknologi informasi mampu mengubah kinerja pemerintah. Pemanfaatan sarana terkait teknologi informasi bisa memengaruhi mutu sistem maupun mutu informasi. Mutu sistem terkait kapabilitas sistem selama menciptakan informasi yang berguna untuk pengguna laporan keuangan. Mutu informasi masih bersinggungan dengan mutu isi yang dianggap penting bagi laporan keuangan. Memanfaatkan teknologi informasi setidaknya bisa memaksimalkan mutu

informasi pada laporan keuangan publik. Kehadiran internet memicu perubahan terhadap prosedur layanan publik yang mengarah ke *e-eovernment* yang bisa memberi layanan secara daring. Penggunaan teknologi ini pun memengaruhi keandalan dalam menyampaikan informasi terkait pemanfaatan dana publik (Hussein *et. al.*, 2005).

Supriyono (2016: 149) memaparkan bila pengendalian internal memberi manfaat bagi organisasi karena kapabilitasnya dalam mengantisipasi atau paling tidak meminimalkan tindakan yang tidak diinginkan atau menyingkirkan tingkah laku yang terjadi; dan mengurangi anggaran dana yang tidak direncanakan atau membuang anggaran dana. Permasalahan pada pengendalian internal, yaitu permasalahan perilaku. Manajer perlu bersikap hati-hati selama merancang pengendalian internal supaya sistem pengendalian berjalan efektif. Penerapan pengendalian internal bermaksud supaya manajemen mendapat kepastian secara layak bila perusahaan memperoleh target maupun tujuan. COSO (2013:3) melalui kerangka kerja terbaru memaparkan perihal maksud pengendalian internal, yaitu kerangka kerja memfasilitasi tiga tujuan agar organisasi terfokus ke aspek pengendalian internal, seperti:

- 1) Tujuan operasi terkait efektivitas maupun efisiensi operasional entitas, termasuk maksud kinerja operasional maupun keuangan, serta melindungi aktiva kerugian
- 2) Tujuan pelaporan mengenai pelaporan keuangan maupun nonkeuangan internal atau eksternal, serta meliputi kredibilitas, ketepatan waktu, keterbukaan, atau syarat lain yang ditentukan oleh pembuat standar atau kebijakan entitas.
- 3) Tujuan kepatuhan perihal ketaatan kepada hukum atau ketetapan sebagai subjek entitas.

Hery (2014:128) memberi simpulan jika pengendalian internal bermaksud guna menjamin secara layak jika:

- 1) Aktiva perusahaan telah mendapat perlindungan dan bermanfaat untuk kepentingan perusahaan. implementasi pengendalian internal agar bermacam kekayaan perusahaan dilindungi secara tepat dari penyimpangan yang berlawanan dengan wewenang.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan secara tepat bermaksud guna meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan secara sengaja atau tidak sengaja.
- 3) Pegawai patuh terhadap hukum. Poin ini cukup rentan pada pengendalian internal, yakni kecurangan pegawai sebagai tindakan tersengaja untuk mendapat keuntungan pribadi.

Pengawasan ialah tahap guna mencari tahu hasil penyelenggaraan tugas kerja yang dilaksanakan pimpinan ke pegawai berdasar pada perintah, rencana, dan tujuan (Dedi Ismatullah, 2012: 96). T. Hani Handoko (2014:358) menguraikan perihal pengawasan, yaitu usaha terstruktur dalam menentukan kinerja standar dalam merencanakan sistem umpan balik informasi, sebagai perbandingan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, sebagai penentuan apakah sudah mengalami penyimbangan, dan penentuan tindakan perbaikan guna memastikan bila sumber daya organisasi sudah berguna secara efektif/efisien dalam memperoleh tujuan.

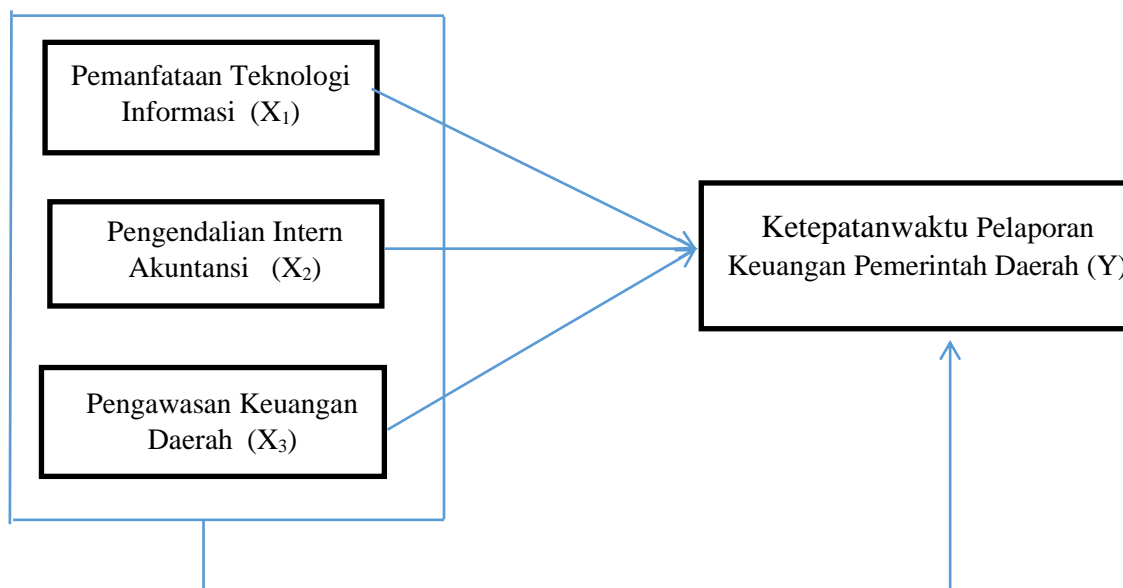
Angger Sigit Pramukti (2016: 15) menyebut bila pengawasan merupakan aktivitas penilaian dari penyelenggaraan aktivitas apakah telah berdasar pada perencanaan. Berikutnya, diprioritaskan ke tindakan pengevaluasian kepada hasil yang didapat. Hendra Karinaga (2017: 54) memaparkan soal keuangan daerah ialah seluruh kewajiban dan hak yang bisa ternilai menggunakan uang atau beragam hal berwujud uang atau barang yang bisa menjadi aset daerah selagi tidak beralih hak berdasar undang-undang. Halim dan Iqbal (2012:37) mengatakan bila pengawasan keuangan daerah ialah tahap aktivitas yang terlaksana secara berkelanjutan sebagai tindakan pengamatan, pemahaman, dan penilaian tiap penyelenggaraan aktivitas agar bisa mengantisipasi maupun memperbaiki kekeliruan.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal maupun pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. Sesuai riset milik S. Rachmawati, Rini, Y. Fitri (2016) yang memperjelas bila variabel secara simultan

penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi maupun pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan bagi ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah. Kajian Estanti (2019) memberikan kesimpulan jika variabel secara simultan penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi maupun pengawasan keuangan daerah memengaruhi bermakna bagi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan.

Kerangka Pemikiran Teoretis

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:



Berdasar kerangka pemikiran di atas, penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal maupun pengawasan keuangan daerah memengaruhi ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah secara parsial maupun simultan. Selain variabel penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah yang berdampak pada ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti transparansi (X_4), akuntabilitas (X_5), kualitas sumber daya manusia (X_6).

Kesimpulan

Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah
- 3) Pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan pemerintah daerah
- 4) Penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berdampak positif maupun krusial pada ketepatanwaktu dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah

Saran

Sesuai kesimpulan yang tersampaikan, saran pada kajian ini ialah masih ada faktor lainnya yang berdampak pada ketepatanwaktu melaporkan keuangan daerah, memanfaatkan teknologi informasi, pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah. Atas dasar

itulah, perlu analisis lanjutan demi memperoleh faktor lainnya yang berpotensi bisa berdampak pada ketepatanwaktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Universitas Negri Padang).
- Drama, H. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Skpd Kota Solok).
- Eristanti, Baiq Dwi Apryana, Hermanto, & Putra, I. N. N. A. (2019). Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. E- Jurnal Akuntansi, 26(1), 622–650,
- Fajrin, Ferawati. (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman). Universitas Negri Padang
- Fransiska, Nur Azlina, & Susilatri. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Square Konsep Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 (Kedua). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haza, Ikwanu. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kuallitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Jurnal, Vol. 2. No. 1.
- Herniyasa, H. (2014). Pengaruh Penerapan Gaya Kepemimpinan Dan Good University Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Politeknik Negeri Bandung). 174–182.
- Kosegeran, A. I., Kalangi, L., & Wokas, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Accountability, 5(2), 178. <https://doi.org/10.32400/Ja.14434.5.2.2016.178-190>
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabiitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No.1.
- Marinawati, 2018. Pengaruh Kuitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendaian Intern terhadap Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, Skripsi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Nihayah, Anisatin. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manuasia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian internal Terhadap Ketepatanwaktuandan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati). Jurnal, Universitas Muhammadiyah.